
Narkotika Golongan 1 2 3

DINAMIKA KEJAHATAN DAN PENCEGAHANNYA

Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Delik-delik yang Berada di Luar KUHP

Hukum Tindak Pidana Khusus

APLIKASI TOKSIKOLOGI DALAM ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

Hukum Kesehatan dan Undang-Undang Kesehatan Serta Permasalahannya

Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika

ARS PRESCRIBENDI 1 Edisi 2

Rentenir penolong Pedagang Kecil?

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan untuk SMA/SMK/MA dan sederajat Kelas X

Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika

EFEKTIVITAS REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN DI INDONESIA

MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN BUDAYA SAROLANGUN DAN ANTI NARKOBA (PBSAN) Untuk SD Kelas V

Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR)

PARADIGMA BARU DALAM PENELITIAN HUKUM

Fanffuan Mental Dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif

PERMASALAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA DI INDONESIA

Rangkuman & Trik IPA SMP 1, 2, 3

Pemandu di Belantara Narkoba

Seri Pendalaman Soal IPA SMP/MTs Kelas 7, 8, 9

KAJIAN DASAR-DASAR HUKUM DAN HUKUM PIDANA

IPA Terpadu SMP/MTs Kls VIII A

Sains

Kontroversi Ganja untuk Medis

Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang serta Tantangan Bagi Profesi Hukum

Anomali Kebijakan Narkotika
Jagalah Dirimu dan Keluargamu dari "Api" Narkoba
Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi
Obat-obat penting
Ilmu Keperawatan Komunitas
Ahok Pun Digoyang
Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)
Top Sukses Fisika-Kimia SMP
Jangan Pernah Tergoda Narkoba
TINDAK PIDANA KHUSUS
All New Target Nilai 100 Ulangan Harian SMP Kelas VIII
MODUL PENGANTAR ASPEK FORENSIK NAPZA
Community and Family Health Nursing - 1st Indonesian Edition
Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak

Narkotika Golongan 1 2
3

Downloaded from
tafayor.com *by guest*

JAXSON CORTEZ

DINAMIKA KEJAHATAN DAN PENCEGAHANNYA

Majelis Ulama
Indonesia

Buku Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan
Kesehatan untuk SMA/MA/SMK dan
Sederajat kelas X, disusun berdasarkan
Kurikulum 2013 yang revisi terbaru.
Disajikan dengan memperhatikan
keterkaitan ilmu teknologi, kesehatan,
lingkungan, dan masyarakat. Materi buku

ini mengungkapkan beberapa tehnik atau
metode ketrampilan mental yang harus
dikuasai oleh peserta didik. Harapannya
melalui Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan
Kesehatan, peserta didik mampu
mengembangkan dan meningkatkan skill
individu secara afektif, kognitif, dan
komunikatif dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan bahasa yang sederhana dan
disertai contoh-contoh mudah dipahami,
diharapkan peserta didik mampu
mengetahui teknik-teknik gerakan yang
benar dan guru cukup penguatan
penjelasan. Selain itu disertai soal-soal

latihan untuk menambah pengetahuan
dari setiap materi yang dipelajari. Semoga
Buku Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan
Kesehatan bisa dijadikan rujukan atau
sumber primer bagi peserta didik dan para
pengajar khususnya dalam melatih mental
bagi peserta didik.

Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Korporasi Elex Media Komputindo
Keberadaan suatu korporasi tidak
terlepaskan dari kehidupan masyarakat
yang justru dapat berdampak negatif,
yakni melakukan berbagai tindak pidana.

Untuk menghadapi maraknya tindak pidana korporasi dewasa ini, telah dilakukan upaya penanggulangan, yakni dengan mengoptimalkan kebijakan kriminal (criminal policy) sebagai upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi, salah satunya dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan formulasi mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus (lex spesialis) di Indonesia dapat dikatakan inkonsisten, tidak harmonis, tumpang tindih, tidak sinkron atau tidak terintegrasi antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain (diatur secara parsial) sehingga mempengaruhi aplikasi dan eksekusinya dalam praktik ber hukum di Indonesia. Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana, pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana dan permasalahan kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban

pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia baik yang sudah maupun yang belum terkodifikasi. Hal ini dibagi ke dalam 3 (tiga) periode, yakni periode tahun 1950 - 1980an (20 undang-undang), a periode tahun 1990 - 2000 (35 undang-undang), dan periode tahun 2000 - 2017 (lebih dari 65 undang-undang) serta pada Rancangan KUHP versi tahun 2015, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Delik-delik yang Berada di Luar KUHP Sinar Grafika

WHO menyebutkan setidaknya terdapat 450 ribu orang yang meninggal per hari akibat penyalahgunaan napza di seluruh dunia dan 30-50 jiwa berasal dari Indonesia. Sementara itu, Provinsi Bali termasuk daerah di Indonesia yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu unsur yang berada di garis depan dalam proses rehabilitasi

pecandu (penyalah-guna) narkoba adalah konselor adiksi. Berbagai metode digunakan dalam konseling ini, dan komunikasi terapeutik adalah salah satunya. Tak hanya bagi petugas rehabilitasi, buku hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi siapa saja yang ingin melihat lebih jauh bahwa komunikasi yang baik sesungguhnya bisa menjadi obat yang manjur untuk mengatasi problema psikis manusia.

Hukum Tindak Pidana Khusus Prenada Media

Bunga Rampai ini berisikan tulisan-tulisan yang telah dibuat oleh Mahasiswa dan Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan di terbitkannya Bunga Rampai ini, diharapkan dapat memberikan informasi maupun referensi di bidang ilmu hukum khususnya mengenai Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).

APLIKASI TOKSIKOLOGI DALAM ILMU KEDOKTERAN FORENSIK Media Nusa Creative (MNC Publishing)
Pengambilan, pengelolaan, proses analisis, dan interpretasi yang baik menjadi proses

yang penting dalam analisis sampel. Dalam buku ini dikupas tentang berbagai jenis sampel yang sering diambil dalam kasus keracunan, lengkap dengan cara pengambilan dan pengelolaannya. Dalam bab yang berbeda diuraikan berbagai prosedur analisis beserta interpretasinya. Beberapa faktor yang bisa memengaruhi hasil pemeriksaan, termasuk faktor pembusukan, diuraikan juga dalam buku ini. Selain itu, terdapat pembahasan tentang NAPZA yang merupakan problem global dengan frekuensi penyalahgunaan sangat tinggi dan merugikan banyak orang. Pembahasan dituangkan secara komprehensif, mulai dari epidemiologi, sejarah, sifat kimia, farmakokinetik, farmakodinamik, gejala intoksikasi, terapi intoksikasi, metode analisis, interpretasi, dan temuan otopsi. Buku ini didukung dengan referensi terbaru dan disajikan secara sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isinya.

Semoga bermanfaat!

Hukum Kesehatan dan Undang-Undang Kesehatan Serta Permasalahannya

Prenada Media

Buku tentang paradigma baru dalam penelitian hukum sebagai pengalaman

pendekatan objek normatif dalam penyidikan perkara pidana di kepolisian berisi tentang adanya asumsi sering terjadi tindakan kekerasan oleh penyidik pada pemeriksaan khususnya interogasi di kepolisian. Akub dan Baharu (2013) mengemukakan bahwa proses interogasi sangat potensial menimbulkan pelanggaran atas hak asasi tersangka karena penyidik mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa untuk mendapatkan keterangan khususnya berupa pengakuan bersalah dari tersangka. Meliala (2001) mengemukakan bahwa sebelum penyidik terbebani target menyelesaikan kasus yang disidiknya, telah hidup keyakinan (belief) bahwa seseorang akan sukar berbohong bila ditekan (under pressure) sehingga cenderung melakukan kekerasan untuk mengungkap pengakuan kejujuran tersangka.

Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika Gramedia Widiasarana

Indonesia

Buku Muatan Lokal Pendidikan Budaya Sarolangun dan Anti Narkotika (PBSAN) ini sebagai bahan ajar bagi peserta didik kelas V SD di kabupaten Sarolangun. Buku

ini telah diupayakan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan melestarikan budaya Sarolangun yang semakin lama berkurang nilai dan keberadaannya serta perlu dilestarikan melalui pembelajaran muatan lokal. Materi buku ini dilengkapi dengan materi Anti Narkotika untuk membentuk generasi berkarakter.

ARS PRESCRIBENDI 1 Edisi 2

Deepublish

Baru-baru ini diberitakan bahwa di Thailand ganja dilegalisasi untuk kepentingan medis. Sedangkan di Indonesia tidak melegalkan penggunaan ganja karena beberapa alasan dan dampak negatifnya. Ganja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana ganja dilarang penggunaannya termasuk untuk medis sekali pun. Indonesia tidak melegalkan ganja demi kepentingan medis karena belum ada penelitian yang membuktikan secara ilmiah terhadap pemanfaatan ganja untuk medis. Sedangkan di Thailand diatur dalam Narcotics Code B.E. 2564 Tahun 2021, di mana ganja diperbolehkan untuk medis. Alasan yang menjadi latar belakang legalisasi ganja di Thailand, di antaranya

adalah alasan politik, alasan bisnis, dan alasan peninjauan ulang narkoba. Namun demikian tetap ada pembatasan penggunaan ganja. Misalnya merokok ganja di tempat umum serta penjualan ganja kepada orang-orang di bawah usia 20 tahun, serta wanita hamil dan ibu menyusui. Buku ini akan mengkaji perbandingan pengaturan maupun penggunaan ganja di Indonesia dan Thailand.

Rentenir penolong Pedagang Kecil?

Absolute Media

Dalam buku ini ada 26 tulisan yang pernah menjadi Trending Topik atau diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Buku ini pun mudah dipahami isinya, baik yang berpendidikan Sarjana Hukum maupun pendidikan non-hukum serta berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas. Tulisan tentang Ahok dibuat untuk menganalisis fakta berita, baik yang dimuat dalam surat kabar maupun media televisi dan media lainnya yang muncul berkali-kali ke permukaan saat ini. Meskipun tinjauannya secara hukum, tulisan ini layak dibaca oleh masyarakat yang awam hukum. Penulis telah membuat beberapa buku di penerbit ini,

antara lain: Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan, Perjalanan KPK Penuh Onak Duri, Koruptor Menguntungkan Koruptor, Rentenir Penolong Pedagang Kecil?, dan KPK Dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi.

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan untuk SMA/SMK/MA dan sederajat Kelas X Penerbit Lakeisha Pelajaran IPA, khususnya FISIKA dan KIMIA merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional. Sebagian besar siswa memandang bahwa IPA adalah pelajaran yang sulit atau bahkan sangat sulit. Padahal pada kenyataannya, IPA merupakan sesuatu yang mengasyikkan jika kita paham konsep dasarnya. Dengan memahami konsep dasar, kita akan mudah menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Pada buku ini, setiap babnya terdiri atas 4 (tiga) bagian. Bagian pertama tentang rangkuman materi, bertujuan untuk memudahkan siswa mengingat materi yang disajikan dalam bab tersebut. Bagian kedua berisi soal bahas Bagian ketiga merupakan pendalaman materi, yang berisi soal-soal Kaji Latih. Dalam setiap babnya, terdiri atas 3 (tiga) tipe soal Kaji

Latih. Basic : Merupakan tipe soal mudah dengan pembahasan cepat dalam satu step. Medium : Merupakan tipe soal sedang dengan pembahasan dibagi dua step untuk mempermudah pengerjaan. Advance : Merupakan tipe soal sulit dengan pembahasan lebih terperinci dibagi beberapa step agar lebih mempermudah siswa dalam pengerjaannya Bagian keempat berisi Bank Soal prediksi Ujian Nasional Sebagian besarnya adalah model soal terbaru. Kami berharap buku ini dapat memberikan gambaran nyata kepada siswa mengenai soal yang pernah diujikan sehingga siswa mampu mengenali perbedaan model soal yang keluar. Dengan memahami berbagai macam model soal, siswa dituntut untuk siap lebih dini untuk menghadapi ujian, baik Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, Ujian Semester, Ujian Kenaikan Kelas, dan Ujian Nasional. Buku ini dilengkapi bonus aplikasi android+ IOS yang dapat di download di play store/ app store, yaitu: Aplikasi CBT Psikotes Aplikasi CBT Ujian Nasional Lengkap (Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris Vbook Pembahasan Soal Matematika

Tryout Online Buku ini adalah pilihan yang tepat!!! Buku ini dapat Anda gunakan sebagai latihan sehingga menjadi senjata ampuh untuk mencapai nilai tinggi. (Genta Smart Publisher)

Hukum Perlindungan Anak Korban

Narkotika Muhammadiyah University Press Ilmu toksikologi forensik merupakan penerapan ilmu toksikologi untuk membantu investigasi medikolegal dalam kasus kematian, keracunan, maupun penyalahgunaan obat-obatan. Analisis obat dan racun sangat penting dalam aplikasi sehari-hari, khususnya dalam bidang forensik dan klinis. Pengambilan, pengelolaan, proses analisis, dan interpretasi yang baik pun menjadi proses yang penting dalam analisis sampel. Dalam buku ini dikupas berbagai jenis sampel yang sering diambil dalam kasus keracunan, dilengkapi dengan cara pengambilan dan pengelolaannya. Dalam bab yang berbeda diuraikan berbagai prosedur analisis beserta interpretasinya. Beberapa faktor yang bisa memengaruhi hasil pemeriksaan, termasuk faktor pembusukan pun turut diuraikan di dalam buku ini. Selain itu, terdapat pembahasan tentang NAPZA yang menjadi

problematika global dengan frekuensi penyalahgunaan sangat tinggi dan merugikan banyak orang. Pembahasan tersebut dituangkan secara komprehensif, dimulai dari epidemiologi, sejarah, sifat kimia, farmakokinetik, farmakodinamik, gejala intoksikasi, terapi intoksikasi, metode analisis, interpretasi, dan temuan otopsi. Penyusunan buku ini didukung dengan referensi terbaru dan disajikan secara sistematis, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isinya. EFEKTIVITAS REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN DI INDONESIA Penerbit NEM Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kemenangannya menyatakan bahwa fokus pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi. Lebih lanjut menurut Presiden, terdapat 5 (lima) hambatan investasi di Indonesia selama ini yaitu masalah regulasi yang tidak tumpang tindih dan tidak jelas, masalah perpajakan, masalah perizinan, masalah ketersediaan lahan, dan masalah ketenagakerjaan. Untuk menghilangkan hambatan tersebut, pemerintah membuat

kebijakan Omnibus Law atau penyederhanaan dan penggabungan beberapa peraturan sekaligus. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong investasi dengan memangkas peraturan-peraturan dan birokrasi yang dinilai tidak efektif, tidak efisien dan high cost. Adapun kebijakan omnibus law terdiri dari dua isu utama yaitu omnibus law cipta lapangan kerja dan omnibus law perpajakan. Menurut pemerintah setidaknya ada 3 (tiga) manfaat dari penerapan Omnibus Law. Pertama, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Kedua, efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang Undang omnibus law cipta lapangan kerja terdapat 11 klaster kebijakan, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan,

10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (OLCLK) yang dirancang oleh pemerintah menimbulkan polemik di masyarakat. Sebagian kalangan menilai bahwa omnibus law tersebut adalah misi ambisius pemerintah untuk meningkatkan investasi negara dengan menguntungkan pihak pengusaha besar tanpa memperhatikan aspek lingkungan, keberlanjutan dan sosial lainnya. Adanya omnibus law tersebut dinilai bertentangan dengan berbagai kebijakan dan aturan diantaranya aturan tentang ketenagakerjaan, aturan tentang reforma agraria khususnya tentang tata guna tanah, ketentuan perizinan, dan sebagainya. Belum tuntasnya pembahasan tentang omnibus law tersebut diperparah dengan kondisi dunia yang semakin tidak menentu hari ini akibat pandemi covid-19. Pandemi telah merubah tananan seluruh manusia, termasuk juga negara-pemerintah yang hari ini disibukkan dengan kebijakan untuk mengatasi pandemi. Kebijakan Omnibus law saat ini juga dipaksa untuk menyesuaikan dengan era baru pandemi yang disebut new normal.

*MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL
PENDIDIKAN BUDAYA SAROLANGUN DAN
ANTI NARKOBA (PBSAN) Untuk SD Kelas V*
Ahlimedia Book

Buku ini berisikan berbagai macam latihan soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda supaya mampu melatih kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada. Buku ini cocok digunakan dalam persiapan menghadapi ulangan harian, ujian tengah semester, ujian kenaikan kelas, ujian akhir sekolah, maupun ujian nasional (UN). Soal yang bervariasi dengan tingkat kesulitan LOTS, MOTS, dan HOTS dapat membantu siswa mengetahui tipe soal yang sering keluar dalam berbagai ujian. Seluruh soal didasarkan pada materi yang telah dirancang sesuai dengan kurikulum terbaru. Pembahasan juga dirancang dengan bahasa yang singkat, padat, dan mudah dipahami.

Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR)
Penerbit P4I

Perkembangan masyarakat mempunyai pengaruh pada perkembangan hukum yang berlaku, termasuk di Indonesia. Dalam hukum pidana yang umumnya

diatur dalam KUHP, karena adanya perkembangan dalam masyarakat yang semakin maju/berkembang maka peraturan-peraturan yang ada tidak memadai lagi, maka dibuatlah Undang-undang baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Apa saja delik-delik hukum yang ada di luar KUHP?? Baca selengkapnya di buku ini Buku Delik-delik yang berada di Luar KUHP ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya. --Penerbit Deepublish, Deepublish, Hukum, KUHP, Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H., M.H.--

PARADIGMA BARU DALAM PENELITIAN HUKUM Elsevier (Singapore) Pte Limited Edisi ke dua Ars Prescribendi ini merupakan revisi edisi pertama. Beberapa bab direvisi sesuai perkembangan ilmu dan penerapan Ilmu Farmasi Kedokteran. Bab III memperluas aspek legal dan etika mengenai obat dan resep. Bab IV merupakan bab baru memuat khusus tentang "Obat Menurut Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah". Tujuan buku Ars Prescribendi ini tetap sebagai dasar dan buku pegangan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dengan memberikan informasi mengenai

penulisan resep yang benar dan rasional. Profesi kesehatan lainnya - dokter gigi dan dokter hewan yang juga dalam menjalankan profesinya menuliskan resep untuk masing-masing penderitanya, juga dapat memanfaatkan informasi dari buku *Ars Prescribendi* ini. Sebetulnya, juga para mahasiswa Fakultas Farmasi dapat menggunakan buku dasar ini karena mereka harus membaca, menerjemahkan dan membuatkan obat sesuai dengan resep yang diterimanya di apotek. Menuliskan resep yang benar dan rasional adalah tanggung jawab dokter yang menandatangani resep yang ditulisnya. *Fanffuan Mental Dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif* Genta Group Production

Ulangan harian menjadi salah satu instrumen untuk pemahaman dan perkembangan akademik siswa. Selain itu, ulangan harian dapat membantu siswa untuk mempersiapkan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Adanya ulangan harian membuat siswa belajar secara mandiri dan memahami materi lebih dalam. Dengan demikian, pemahaman dan perkembangan akademik siswa menjadi meningkat. Buku All New

Target Nilai 100 Ulangan Harian SMP Kelas VIII merupakan pilihan tepat untuk menunjang siswa belajar secara mandiri dan memahami materi lebih dalam. Buku ini disusun berdasarkan kurikulum terbaru dari Kemdikbud. Siswa akan mendapatkan ringkasan materi, ulangan harian, serta ulangan akhir semester 1 dan 2. Semua disajikan dengan padat, jelas, dan mudah dipahami. Dengan keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa dalam menghadapi ulangan harian dan ulangan akhir semester. Selamat belajar! Buku persembahkan penerbit Cmedia

PERMASALAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA DI INDONESIA Deepublish

Buku ini menyuguhkan beberapa informasi tentang narkoba agar generasi muda dapat menghindarinya. di dunia medis, narkoba boleh di gunakan namun dengan dosis tertentu. selain alasan medis, narkoba juga bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. perlu diketahui, terlalu banyak menggunakan narkoba akan membuat seseorang kecanduan dan tak bisa lepas dari narkoba. itulah sebabnya, orang tua atau guru wajib memberikan pemahaman

tentang narkoba.

Rangkuman & Trik IPA SMP 1, 2, 3 EGC

Sejak zaman kolonial Belanda permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah ada, bahkan oleh pemerintahan Belanda waktu itu diterbitkan undang-undang untuk mengontrol peredaran dan pemakaian narkoba kepada masyarakat waktu itu. Pada zaman Orde Baru mulai dibentuk lembaga khusus untuk mengatasi enam permasalahan nasional yang salah satunya adalah masalah narkoba. Lembaga pertama ini dibentuk atas Instruksi Presiden 1971 kepada Badan Koordinasi Intelijen Nasional yang kemudian membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden 1971. Bakolak inilah yang menjadi cikal bakal pembentukan Badan Narkotika Nasional. Bakolak mengalami banyak sekali permasalahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai badan pemberantas narkoba di Indonesia sampai pada akhirnya berubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional. Di awal pembentukannya, masalah yang dihadapi mulai dari tubuh kelembagaannya, personil keanggotaan, wewenang samapai alokasi anggaran khusus untuk

pelaksanaan tugas dan fungsi. Di samping permasalahan pada tubuh kelembagaan sendiri, permasalahan lainnya muncul dengan bukti bahwa makin marak dan makin bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak hanya sebagai dasar hukum atas keberadaan BNN, tetapi juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNN sendiri. Dalam undang-undang tersebut membahas secara lengkap segala persoalan tentang narkoba, mulai dari pengertian narkoba, jenis serta penggolongan narkoba, pembinaan serta pengawasan, pengobatan serta rehabilitasi, dan aspek hukum pidananya

Pemandu di Belantara Narkoba Elex Media Komputindo

Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang

memuat norma, sanksi pidana, dan hukum acara pidana yang bersifat khusus. Terbentuknya berbagai UU tersebut sedikit banyak akan berpengaruh pada upaya sinkronisasi dan efektivitas penegakannya. Bahkan dapat menjadi pemicu terjadinya tumpang-tindih kewenangan yang dapat berujung pada konflik antar-sesama penegak hukum. Buku ini terdiri atas empat bab: Bab 1 tentang pendahuluan, berisi sejarah perkembangan Hukum Pidana Khusus dan politik hukum pidana. Bab 2 tentang pengertian dan karakteristik Hukum Pidana Khusus, berisi pengertian hukum pidana, sifat dan pembagian hukum pidana, pengertian Hukum Pidana Khusus, dan karakteristik Hukum Pidana Khusus. Bab 3 tentang subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bab 4 tentang ruang lingkup Hukum Pidana Khusus, yang terdiri atas uraian terhadap 31 (tiga puluh satu) perumusan tindak pidana (delik) dalam UU yang tersebar di luar KUHP. Perumusan tindak pidana tersebut, yakni: (1) Tindak pidana dalam UU Korupsi; (2) Tindak pidana dalam UU Pencucian Uang; (3) Tindak pidana dalam UU Terorisme; (4) Tindak pidana dalam UU Pengadilan Hak

Asasi Manusia; (5) Tindak pidana dalam UU Narkoba; (6) Tindak pidana dalam UU Psikotropika; (7) Tindak pidana dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (8) Tindak pidana dalam UU Lingkungan Hidup; (9) Tindak pidana dalam UU Perikanan; (10) Tindak pidana dalam UU Kehutanan; (11) Tindak pidana dalam UU Penataan Ruang; (12) Tindak pidana dalam UU Keimigrasian; (13) Tindak pidana dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (14) Tindak pidana dalam UU Kesehatan; (15) Tindak pidana dalam UU Praktik Kedokteran; (16) Tindak pidana dalam UU Sistem Pendidikan Nasional; (17) Tindak pidana dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; (18) Tindak pidana dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (19) Tindak pidana dalam UU Perlindungan Anak; (20) Tindak pidana dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik; (21) Tindak pidana dalam UU Pornografi; (22) Tindak pidana dalam UU Kepabeanaan; (23) Tindak pidana dalam UU Cukai; (24) Tindak pidana dalam UU Perlindungan Konsumen; (25) Tindak pidana dalam UU Pangan; (26) Tindak pidana dalam UU Paten; (27) Tindak

pidana dalam UU Merek; (28) Tindak pidana dalam UU Hak Cipta; (29) Tindak pidana dalam UU Pemilu; (30) Tindak pidana dalam UU Kewarganegaraan; dan (31) Tindak pidana dalam UU Penerbangan. Sebagai buku yang mengkaji tindak pidana di luar kodifikasi (KUHP), buku ini perlu dibaca oleh berbagai kalangan terutama mahasiswa Fakultas Hukum, akademisi, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim,

advokat, pegawai rutan/lapas) dan semua kalangan yang tertarik untuk mengenal dan mendalami tindak pidana di luar KUHP. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup Kencana *Seri Pendalaman Soal IPA SMP/MTs Kelas 7, 8, 9* Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Tulisan ini berawal dari sebuah penelitian dilaksanakan di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam pada Tahun 2018. Penelitian tersebut dimaksudkan

untuk mengantarkan pembaca dalam memahami secara yuridis normatif maupun secara yuridis sosiologis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang dilaksanakan di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis efektivitas rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, seberapa efektif program tersebut dapat memulihkan pecandu narkotika.